

15 KK Akan Direlokasi Imbas Abrasi Sungai Cipamingkis Bogor

BOGOR (IM)- Tebing Sungai Cipamingkis Jonggol, Kabupaten Bogor, mengalami abrasi hingga menghancurkan rumah dan musala. Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) akan direlokasi.

“Sekarang ada 22 KK yang masih mengungsi di tenda darurat, sampai mereka dapat kontrakan. Mereka dikontrakan sama Pemkab,” kata Staf Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Jalaludin, Minggu (6/11).

“Hasil rapat sementara itu, yang direlokasi ada 15 KK dari total 22 KK yang mengungsi. Itu sudah hasil asesmen petugas ya,” tambahnya.

Jalaludin memastikan pergerakan tanah di lokasi abrasi ini sudah tidak terjadi. Pergerakan tanah, kata Jalal, diprediksi akan terulang dan menimbulkan abrasi jika debit Sungai Cipamingkis kembali meningkat.

“Itu yang kemarin rumah dan musala ambruk itu karena abrasi ya, jadi debit air meningkat kemudian posisi di situ kan cekungan, aliran airnya deras terus menghantam cekungan tanah yang di atasnya ada permukiman warga itu, jadi terikis terus abrasi,” beber Jalal.

“Jadi nggak ada pergerakan tanah kalau kondisi sekarang, itu terjadi kalau ada debit air meningkat aliran air jadi deras. Kalau saat sekarang nggak ada (pergerakan

tanah),” tambahnya.

Dari hasil rapat koordinasi penanganan abrasi di Jonggol Kabupaten Bogor, kata Jalal, dibutuhkan pengerasan di tebing Sungai Cipamingkis agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, aktivitas galian pasir ilegal yang dilakukan di sekitar lokasi abrasi juga diminta dihentikan.

“Hasil rapat sementara kemarin itu yang dibutuhkan di situ harus dibangun bronjong. Untuk kewenangan sungainya itu ada di SDA Provinsi Jabar kan itu. Dalam rapat itu juga mereka (SDA Pemrov Jabar) usulkan supaya aktivitas galian pasir di situ dihentikan. Itu usulannya,” kata Jalal.

Diberitakan sebelumnya, pergeseran tanah terjadi sekitar aliran Sungai Cipamingkis, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, satu rumah warga dan musala ambruk, lalu terbawa arus sungai.

“Saat ini bagian tanah yang bergeser masih terus bergerak serta mengakibatkan rumah dan musala ambruk, serta hilang terbawa arus Sungai Cipamingkis,” kata staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin melalui keterangannya, Sabtu (5/11).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (4/11) pada pukul 21.05 WIB. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD. ● **gio**

Diduga Hendak Tawuran, Belasan Remaja di Semplak Bogor Ditangkap

BOGOR (IM)- Diduga hendak tawuran, belasan pelajar SMK Kota Bogor ditangkap saat sedang berkumpul di wilayah Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Salah satu di antaranya kedatangan membawa senjata tajam jenis celurit.

Anggota Satgas Pelajar Kota Bogor, Arif, mengatakan pihaknya mendapat informasi dari masyarakat sekitar terkait adanya sekumpulan pelajar SMK menunggang sedang nongkrong. “Tadi sama rekan diamankan dulu, mereka sedang nongkrong ada bekas minuman ciu sudah habis,” kata Arif dikonfirmasi, Minggu (6/11).

Dia menyebutkan, saat ditangkap ada sekitar 16 pe-

lajar yang salah satunya perempuan. Setelah dicek, salah seorang pelajar kedatangan membawa senjata tajam jenis celurit disimpan di dalam tas ranselnya.

Selanjutnya, kata dia, para pelajar tersebut dibawa ke Polsek Bogor Barat untuk dilakukan pendataan sambil menunggu orangtua. Untuk pelajar yang membawa senjata tajam prosedurnya diserahkan ke polisi. “Dibawa ke Polsek Bogor Barat, infonya menunggu orangtua. Kalau yang bawa sajam belum monitor lagi dilanjut (proses hukum) atau bagaimana,” ujar Arif.

● **gio**



PARADE SETIA BUDI SOLO

Sejumlah mahasiswa berkostum batik kreasi saat mengikuti parade pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Solo, Jawa Tengah, Minggu (6/11). Parade yang digelar sebagai perayaan Dies Natalies ke-25 Universitas Setia Budi Solo tersebut sekaligus untuk mengenalkan kampus setempat kepada masyarakat.

Pedagang di Cianjur Mendapat Subsidi Harga dalam Gerakan Pangan Murah

CIANJUR (IM)- Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memberikan subsidi bagi pedagang Rp2.000 per kilogram untuk beragam komoditas pangan yang akan dijual dalam Gelar Pangan Murah (GPM) di Cianjur guna menekan kenaikan harga dan meningkatkan daya beli warga.

Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Cianjur, Wahyu Hidayat di Cianjur, Sabtu, mengatakan kegiatan GPM akan digelar tanggal 8 November di sejumlah pasar tradisional di Cianjur, sebagai upaya menekan inflasi dan meningkatkan daya beli.

“Kenaikan harga kebutuhan pangan membuat daya beli warga menurun, sehingga Pemkab Cianjur bersama instansi lintas sektoral akan menggelar GPM yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Kegiatan ini juga dilaksanakan serempak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,” kata Wahyu Hidayat.

Pihaknya, ungkap Wahyu Hidayat, akan berkoordinasi dan memfasilitasi pedagang untuk menurunkan harga kebutuhan pangan seperti telur, cabai dan lainnya, sehingga kekurangan-

nya akan disubsidi pemerintah daerah seperti harga telur yang seharusnya Rp27 ribu per kilogram akan dijual di angka Rp25 ribu per kilogram.

Sedangkan kekurangannya akan ditambah sebesar Rp2.000 per kilogram dari pemerintah, sedangkan komoditas yang mendapat subsidi adalah beras sebanyak 2.000 kilogram, bawang merah 150 kilogram, serta cabai rawit merah, bawang putih, dan cabai merah kering masing-masing 50 kilogram.

“Dilanjutkan dengan kebutuhan pangan, telur dan daging ayam masing-masing 200 kilogram, gula pasir dan daging sapi masing-masing 100 kilogram, minyak goreng 500 liter, ditambah komoditas pangan lainnya sebanyak 207 kilogram,” kata Wahyu Hidayat.

Sebelumnya tambah dia, rapat koordinasi untuk persiapan GPM sudah dilakukan bersama Bulog, Dinas PKHP, Bagian Perekonomian Setda Cianjur, P3DW, BUMD Cianjur, Hiswanamis dan beberapa kelompok tani. “Kegiatan ini akan dilakukan bertahap setiap bulan-nya sehingga inflasi dapat ditekan dengan berbagai cara,” kata Wahyu Hidayat. ● **pra**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

W20 UMKM JABAR EXPO

Pengunjung melihat sejumlah produk UMKM Jawa Barat pada acara W-20 Indonesia UMKM Expo di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/11). Pameran dalam memeriahkan rangkaian G-20 Indonesia tersebut menampilkan produk UMKM Jawa Barat hasil dari pelaku industri perempuan sekaligus mengangkat peran perempuan dalam memulihkan dan memajukan roda ekonomi.

POLRES BOGOR SEGERA TETAPKAN TERSANGKA

Limbah Cair B3 di Tenjo Berbahaya

Pemulihan lingkungan di TPA ilegal limbah B3 di Kampung Cibadak RT 01 RW 03 Desa Ciomas, Tenjo, tidak hanya membutuhkan waktu dan upaya, tetapi juga biaya yang mahal, kata Plt Kabid Penjaga Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Dyan Heru Sucahyo.

TENJO (IM)- Dari belasan jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal di Kampung Cibadak RT 01 RW 03 Desa Ciomas, Tenjo, Kabupaten Bogor, limbah cair disebutkan yang paling berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Kalau dibanding limbah

padat, limbah cair berupa cairan yang berwarna cokelat kehitaman merupakan yang paling berbahaya dan paling susah pemulihan lingkungannya,” kata Plt Kabid Penjaga Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Dyan Heru Sucahyo kepada wartawan,

Minggu (6/11).

Dyan Heru Sucahyo menuturkan cairan limbah B3 tersebut perlu dikaji atau diteliti lebih ‘dalam’ oleh ahli kesehatan, airnya saja bisa menyebabkan kulit manusia mengalami gatal-gatal.

“Kalau dampak negatif fisik, yaitu kulit mengalami gatal-gatal. Yang kami sangat khawatirkan, kalau cairan limbah B3 tersebut mencemari sumur warga karena kalau dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Saya mengimbau, apabila air sumur warga mengalami perubahan warna, perubahan rasa dan kekenyalan, maka jangan dikonsumsi serta lebih baik warga membeli air mineral,” tutur Dyan.

Ia menjelaskan bahwa pemulihan lingkungan di TPA ilegal limbah B3 di Kam-

pung Cibadak RT 01 RW 03 Desa Ciomas, Tenjo, tidak hanya membutuhkan waktu dan upaya, tetapi juga biaya yang mahal.

“Masing-masing jenis limbah B3 berbeda cara pananganan dan pemulihan, jika bekas pembakaran abu bata bara hanya butuh dikeruk hingga lapisan tanah, maka limbah cair itu lebih sulit. Perkiraan butuh dana lebih dari Rp 3 miliar untuk pemulihan lingkungannya,” jelasnya.

Diwawancara terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo De Cuellar Tarigan menerangkan bahwa butuh hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bogor dalam penetapan calon tersangka.

Saat ini dugaan pembuangan ilegal limbah B3 sudah dinaikkan dari tahap peneli-

kan ke tahap penyidikan, kami butuh hasil uji laboratorium dan alat bukti lainnya sebelum menetapkan tersangka pencemaran lingkungan hidup,” terang AKP Siswo De Cuellar Tarigan.

Mantan Kasat Reskrim Polres Majalengka ini memaparkan bahwa jajarannya sudah meminta keterangan sejumlah pihak, setidaknya jumlahnya mencapai tiga orang.

“Sat Reskrim Polres Bogo baru meminta keterangan saksi-saksi dan belum kepada calon tersangkanya, selain menguji air, kami bersama DLH kabupaten Bogor bakal menguji tanah dan udara di sekitar TPA ilegal limbah B3. Kami juga akan meminta keterangan ahli lingkungan terkait hal ini untuk dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” paparnya. ● **gio**

Melalui Talkshow Plt Bupati Bogor Jabarkan Program Pancakarsa

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan menangkap tentang program Pancakarsa di Kabupaten Bogor. Ia menyebutkan program tersebut terus fokus dilakukan untuk mewujudkan target-target yang telah tercantum dalam RPJMD selama lima tahun dari 2018-2023. Di antaranya yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas, Bogor Maju, Bogor Membangun dan Bogor Berkeadilan.

Hal ini diungkapkan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan hadir saat Talkshow Bicara Bogor diinisiasi Radar Bogor dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Radar Bogor ke-24, berlangsung di Atrium Botani Square, Jumat (4/11) kemarin.

Selain Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan hadir juga sejumlah tokoh ternama seperti Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, hingga Rocky Gerung. Turut hadir juga Kepala Bappedalitbang, Kadis PUPR

dan Plt. Asisten Ekabng.

“Melalui program Pancakarsa, kita ingin wujudkan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas mulai tingkat Posyandu, Puskesmas dan RSUD. Pemenuhan sarana prasarana melalui alat kesehatan, pembangunan RSUD Parung untuk menciptakan masyarakat sehat, mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, SDM berkualitas, infrastruktur dan masyarakat sejahtera,” jelas Plt. Bupati Bogor. ● **gio**

NPCI Mengaku Siap Menghadapi Peparda VI Jabar 2022 di Bekasi

BOGOR (IM)- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima Tim National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan persiapan NPCI jelang Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Bogor, belum lama ini.

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan NPCI saat ini sedang membahas persiapan jelang Peparda VI Jawa Barat tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Persiapan mereka sudah mencapai di atas 80% baik dari atlet yang sedang Pelatcab juga dari kontingen.

“Pada prinsipnya sudah siap mengikuti Peparda yang akan menjajal NPCI, terdiri dari angkat berat 4 orang, atletik 13 orang, bulu tangkis 4 orang, ca-

siap, siap atletnya, siap kontingennya, siap peralatannya, dan siap dengan akomodasinya,” tukas Iwan.

“Saya apresiasi kesiapan NPCI dan kontingen, semoga target juara umum bisa tercapai di Peparda VI Jabar mendatang,” katanya.

Sementara Ketua NPCI Kabupaten Bogor, M. Misbah menjelaskan, proses perekrutan hingga Pelatcab berlangsung dari 10 Januari hingga Juni 2022, ada 130 atlet yang direkrut, terbagi kedalam delapan Cabang Olahraga (Cabor), yakni, angkat berat, atletik, bulutangkis, catur, menembak, panahan, renang, dan tenis meja.

Sedangkan, dari 130 atlet yang dibina, hanya 33 atlet yang lolos seleksi yang kini sedang menjalani Pelatcab, terdiri dari angkat berat 4 orang, atletik 13 orang, bulu tangkis 4 orang, ca-

tur 1 orang, menembak 3 orang, panahan 6 orang, renang 9 orang dan tenis meja 10 orang.

“Pelatcab kita laksanakan selama tiga bulan, dimulai 25 Agustus 2022 lalu, kita fokuskan dan pusatkan pada latihan untuk menguji ketangkasan, dan mudah-mudahan dengan Pelatcab ini performa atlet sesuai dengan yang kita harapkan dapat mempertahankan juara umum,” ungkap M. Misbah.

Sementara itu, Ketua Kontingen Peparda, Bambang Tawekal menambahkan bahwa saat ini jumlah kontingen dan pengurus harian dan seluruh koordinator bidang terdapat 30 orang. Dan senantiasa melakukan Rakor untuk membagi tugas sesuai SK Bupati Bogor. “Alhamdulillah untuk persiapan secara keseluruhan dari kontingen sudah mencapai 80%,” tukasnya. ● **gio**



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima Ketua NPCI Kabupaten Bogor, M. Misbah dan Ketua Kontingen Peparda, Bambang Tawekal.

Dedie akan Tindak Tegas Usaha yang Tidak Berizin

BOGOR (IM)- Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim akan menindak tegas tempat usaha yang tidak berizin sesuai aturan yang berlaku di Kota Bogor. Pihaknya akan bergerak cepat untuk memeriksa izin tempat-tempat usaha, khususnya tempat usaha yang baru buka.

“Jadi kami akan petakan, kemudian dari kelurahan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor mengecek ke lapangan. Kalau mengukutnya belum lengkap, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta untuk melinkkan dengan Pajak Bangunan 1 (PB1). Kalau izin tidak ada tentu akan ditindak,” ungkap Dedie kepada wartawan pada Minggu (6/11).

Dedie melanjutkan, penindakan dilakukan setelah melalui fase peringatan dan sebelumnya diberi kesempatan untuk mengurus izin setelah mereka selesai membangun. “Tetapi dalam kenyataannya, kemudian mereka yang memiliki tempat usaha tidak melakukan langkah-langkah sesuai aturan, maka akan ditindak tegas. “Telat nanti, intinya pemerintah akan melakukan pemutihan kepada bentuk-bentuk usaha yang izinya belum lengkap. Tetapi disatu sisi, kami senang banyak sekali laporan yang menyatakan tempat usaha cafe dan resto berkembang di Kota Bogor,” tutur Dedie.

“Ya, itu artinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih tinggi, selama semua izin dan persyaratan dipenuhi pengusaha. Jadi dilakukan pemetaan mana saja yang sudah lengkap, mana yang dalam proses dan mana saja yang belum berizin,” tambah Dedie.

Dedie menekankan, dan juga untuk memastikan disinkronkan atau dilink ke PB1 atau pajak pembangunan 1 Kota Bogor. Tentunya supaya semua bentuk dan jenis usaha baru harus terdaftar, maupun yang belum lengkap terdaftar itu dilinkkan ke PB1. “Catatannya kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya membahayakan lingkungan sekitar, begitu kan ya atau kemudian hal yang mengganggu warga sekitar maupun masyarakat. Ya, itu tinggal kami dorong buat izin untuk melengkapinya,” tegasnya.

Dedie memaparkan, pihaknya tengah pemetaan cafe dan restoran yang ramai tumbuh pasca pandemi Covid-19 dua tahun, tapi sebagian tempat usaha ada yang tutup karena dampak pandemi Covid-19. “Ya, kemudian setelah banyak yang tutup, tumbuh usaha baru,” pungkasnya.

Sementara, diketahui, bangunan atau tempat usaha yang dimaksud dan diduga masih belum memiliki perizinan yang lengkap, adalah Mie

Gacoan di Bogor Barat, Mie Gacoan di Bogor Tengah, Mie Gacoan di Bogor Timur dan Bejawa Flores Bogor di Bogor Tengah.

“Terpisah, Kabid Lalu Lintas pada Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudi, menuturkan, terkait izin lalu lintas atau saran teknis (sartek) lalu lintasnya. Jika Mie Gacoan ada tiga bangunan. Pertama di Brigien Saptaji, Semplak itu belum ada permohonan izin masuk, jalan tersebut kewenangannya ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. “Belum pernah ada permohonan (izin) masuk dari Mie Gacoan di Bogor Barat,” tegas Dody.

Dody menjelaskan, kedua, Mie Gacoan di ruas Jalan Raya Tajur, namun itu merupakan jalan nasional dan kewenangan ada di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Dan dari BPTJ pun belum ada surat ke Dishub Kota Bogor, karena kita sebagai kepanjangan tangan dari BPTJ yang melakukan pengawasan. Sudah dua kali juga kita Mie Gacoan Tajur, kemudian kita tanya izin jalan dan memang belum ada. Mereka bilangnya sedang diurus, tapi belum ada. Karena kita di sana hanya bertemu mandorinya. Tidak ketemu pemiliknya,” jelasnya.

Dody membeberkan, kemudian untuk Mie Gacoan di ruas Jalan Pajajaran, rekomendasi teknis dari BPTJ telah keluar sejak Maret 2022. “Kami sudah melakukan evaluasi dengan Satlantas, BPTJ itu sudah clear dari sisi Amdal Lalin. Nah, izin lainnya kita tahu dan lebih baik ditanya ke dinas lain yang terkait,” terangnya.

Dody menambahkan, resto atau cafe Bejawa Flores Bogor sampai saat ini, belum ada permohonan apapun yang masuk terkait izin lalinya. Karena itu, Dishub belum bisa melakukan proses. Sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, itu dihitung berdasarkan jumlah kursi yang disediakan oleh pengelola dan dilihat dari kapasitas parkir nantinya. “Kalau jumlah kursi lebih dari 300, pemohon wajib mengurus dokumen Amdal Lalin. Kita belum tahu ada berapa kursi di sana (Bajawa). Nanti bisa dilihat dari gambar Pra Site Plan saja,” tuturnya.

Masih kata Dody, Amdal Lalin untuk rumah makan 100-300 kursi itu, cukup dengan saran teknis lalu lintas. Untuk yang lebih dari jumlah tersebut, maka harus membuat Amdal Lalin oleh konsultan. ● **gio**